

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah perairan Laut Sulawesi-Laut Sulu memiliki nilai strategis yang digunakan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan armada tanker minyak dan armada dagang melintasi jalur tersebut. Karena potensi, letak, dan intensitas aktivitas lautnya yang ramai, jalur ini menghadapi sejumlah masalah. Seperti masalah pelanggaran wilayah yang disebabkan karena posisi perairan yang tepat berada di perbatasan kedua negara. Selain itu, terdapat masalah penangkapan ikan secara ilegal, masalah penyelundupan senjata dan perdagangan manusia, serta masalah perompakan kapal yang disertai dengan penculikan awak kapal. Tentunya hal tersebut menjadi beban yang besar bagi pemerintah Indonesia dan negara tetangga. Belum lagi kedua negara Indonesia dan Filipina memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda-beda pada perairan ini (Rustam, 2016).

Sementara itu, Laut Sulawesi-Laut Sulu telah menjadi perhatian banyak negara karena terjadi peningkatan kasus pembajakan kapal niaga di wilayah perairan tersebut terutama pada tahun 2016. Model kejahatan berulang kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berdomisili dalam pulau-pulau kecil yang terletak di Kepulauan Sulu. Kepulauan Sulu terdiri dari beberapa pulau diantaranya Pulau Sibutu, Tawi-tawi, Jolo dan Basilan. Dalam sejarahnya terdapat

beberapa kelompok bajak laut dari kepulauan Filipina Selatan diantaranya kelompok Lanun, Balangingi dan Mindanao (Wawan, 2012).

Dalam laporan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP) sepanjang tahun 2016 telah terjadi 16 kali kasus penyanderaan kru kapal di Laut Sulawesi-Laut Sulu. Pada tanggal 26 Maret 2016 telah terjadi pembajakan Kapal Brahma 12 serta penyanderaan terhadap 10 ABK warga negara Indonesia. Pada bulan April terjadi pembajakan terhadap kapal berbendera Malaysia yaitu kapal MV Massive 6 dan menyandera sebanyak 4 ABK Malaysia, kemudian pada pertengahan April 2016 kembali terulang pembajakan terhadap kapal TB Henry dan Cristi dengan korban 4 ABK warga Indonesia. Pada bulan Juni kapal TB Charles 001 dan Robby 152 dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf dengan menyandera 7 ABK. Selanjutnya pada bulan Juli 2016 telah terjadi dua kali insiden terhadap kapal Indonesia Fishing Trawler dan kapal Malaysia Serudong. Disusul insiden pada bulan September yang menimpa kapal Fishing Trawler, pada bulan Oktober menimpa kapal Dong Bang Giant, di bulan November terdapat 6 kasus dan bulan Desember 2 kasus (Djelantik, 2017).

Kejahatan bajak laut yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi-Laut Sulu dilakukan oleh kelompok separatis yang mendiami pulau-pulau kecil di Selatan Filipina antara lain Pulau Jolo, Basilan, Tawi-tawi dan Mindanao. Kelompok ini merupakan gerakan perlawanan yang lahir dari organisasi yang menuntut kemerdekaan pada pemerintah Filipina. Kelompok ini dikenal dengan nama Abu Sayyaf, yang belakangan melakukan aksi kejahatan laut tanpa memandang status kewarganegaraan korbannya. Pergerakan politik Abu Sayyaf kini mengalami pergeseran pada aksi-aksi penculikan untuk menuntut uang tebusan dari pada

menyiapkan berdirinya sebuah Negara Islam di Asia Tenggara, seperti tujuan awal dibentuknya organisasi tersebut (Tunggal, 2013, 62).

Penguasaan wilayah pulau-pulau kecil dengan hutan sebagai markas komando dan aksi kejahatan dilakukan di wilayah perairan didukung oleh kontur geografis Filipina selatan. Abu Sayyaf diperkirakan memiliki ratusan gerilyawan aktif yang memiliki kemampuan dalam medan hutan pegunungan di pulau-pulau terdekat sebagai basis dalam melakukan operasi penculikan di laut. Kejahatan berupa gangguan keamanan laut yang melibatkan kelompok ini sebenarnya sudah lama terjadi dan Pertama kali pada tahun 1991 dengan kasus pelemparan granat ke kapal Doulos (Jhon, 2017).

Peristiwa penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf yang basis operasinya di Jolo dan Basilan di Kepulauan Sulu beberapa waktu lalu, telah mengakibatkan Laut Sulawesi - Laut Sulu mulai menjadi pusat perhatian dunia internasional. Aksi para bajak laut yang tidak pandang bulu merompak kapal nelayan kecil hingga kapal kontainer raksasa telah membuat gerah dua negara khususnya Indonesia dan Filipina. Masalah ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses interaksi aktor-aktor negara dan non-negara semakin memperkeruh suasana.

Pada Maret 2016 menjadi awal pergulatan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pembajakan di Laut Sulawesi-Laut Sulu. Penyusunan langkah dan strategi pembebasan warga Indonesia yang disandera melibatkan sejumlah jajaran kementerian. Langkah pertama yang diambil dengan mengaktifkan *crisis center*. Selain itu, Indonesia akan memperpanjang moratorium ekspor batubara dengan Filipina melalui wilayah Laut Sulawesi dan Laut Sulu sampai pemerintah

Filipina mampu memberikan jaminan keamanan pada jalur tersebut. (Kemenkoplhukum, 2017).

Dalam menghadapi isu keamanan non-tradisional, tindakan yang dilakukan negara dapat berupa tindakan militer maupun non-militer yang sifatnya lebih diplomatis. Kejahatan transnasional adalah aktivitas kelompok terorganisir yang tujuan utamanya adalah mendapatkan uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sekecil mungkin. Kegiatan mereka meliputi jual beli senjata, narkoba, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, ekologi dan sebagainya yang melintasi batas negara (Julianus, 2007).

Jaringan teroris di Asia Tenggara merupakan jaringan teroris yang berkembang dari kelompok radikal yang bertopeng atribut islam. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kelompok radikal yang berada di kawasan Asia Tenggara telah berkembang menjadi jaringan teroris yang melintasi batas-batas negara dan menjadi jaringan teroris berskala internasional. Maka hal ini dilakukan karena kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di kedua negara tersebut merupakan kategori pemberontak atau kelompok separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan nasional sehingga perlu pendekatan militeristik (Tjarsono, 2012).

Gerakan terorisme di Asia Tenggara pada awalnya merupakan gerakan sentimen yaitu gerakan separatisme yang ingin menentang pemerintahan nasional atas ketidakadilan dan alienasi yang diterima oleh kelompok radikal tersebut. Dengan semangat etno-nasionalisme yang biasanya juga diiringi dengan

membawa identitas religi yang dianutnya. Maka dapat dikatakan secara umum gerakan terorisme di Asia Tenggara dapat dilihat sebagai gerakan yang lahir dari kelompok suku minoritas yang memiliki preferensi kepercayaan (*belief*) yang berbeda dan diperburuk lagi dengan adanya masalah ketidakadilan dalam memenuhi kesejahteraan kelompok minoritas tersebut (Wuryandari, 2014, 79).

Pada dasarnya terbentuk kelompok islam radikal ini menjadi teroris karena alasan kebijakan (*policy*) yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya benturan dan perlawanan antara kelompok radikal dengan pemerintah sehingga terjadi aksi teror. Kelompok terorisme ini pada mulanya lahir dari kelompok-kelompok etno-religi yang menginginkan adanya pemisahan dari negara. Terorisme di Filipina juga dapat dikatakan sangat pesat perkembangannya dalam melakukan aksi teror, ancaman teror yang dihadapi oleh pemerintah Filipina. Negara dianggap tidak mampu mengakomodir hak-hak kelompok tersebut, Sehingga keinginan dari kelompok ini adalah terbentuknya negara baru yang berlandaskan hukum Islam (Sudiaman, 2016).

Melihat perkembangan isu-isu terorisme di kawasan laut Sulawesi-laut Sulu maka diperlukan langkah dalam menyusun strategi penanggulangan terorisme yang komprehensif, faktor konflik internal perlu menjadi perhatian. Ini karena, konflik internal merupakan salah satu penyebab tumbuhnya radikalisme dan ekstrimisme di suatu negara, hal tersebut akan mempengaruhi timbulnya aksi teror dan konflik internal berskala kecil yang dapat bereskalasi menjadi konflik besar yang mengancam keamanan kawasan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu segera mengelola konflik yang ada sebelum bereskalasi lebih jauh dan

bertransformasi menjadi gerakan terorisme. Pentingnya aspek kemanusiaan dalam program deradikalisasi membuat program-program deradikalisasi ke depan perlu memperhatikan faktor hubungan keluarga, nilai-nilai dan pandangan hidup, serta aspirasi personal para mantan pelaku terorisme (Kemenlu, 2015).

Upaya yang dilakukan ASEAN bersepakat meningkatkan tukar menukar informasi dan kerjasama antar lembaga terkait pencegahan terorisme. ASEAN mendukung pemberantasan terorisme melalui kerjasama pendeteksian, investasi, monitoring, dan pelaporan. Peran ASEAN dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi internasional seperti yang terjadi pada tahun 1999 dengan mengeluarkan rencana aksi pemberantasan kejahatan lintas negara pada level nasional, regional maupun global. Indonesia menjalankan kebijakan yang lebih sistematis dengan membangun kerja sama kawasan, selain berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi (*ASEAN Declaration on Joint to Counter Terorisme*) pada November 2001 di Brunei Darusalam.

Upaya lain ASEAN adalah membentuk jaringan di antara badan-badan penegakan hukum terkait pemberantasan terorisme dan saling tukar menukar data intelijen. ASEAN juga menjalankan beberapa pelatihan yang syaraf bagi para petugas kepolisian dan intelijen, cara mendeteksi bahan-bahan peledak (bom), dan investasi pasca ledakan. Pelatihan juga diberikan mengenai keamanan di bandara dan keamanan dokumen perjalanan, termasuk masalah-masalah imigrasi dan pengawasan perbatasan. Semakin meningkatnya peristiwa penyanderaan di antara perairan kawasan maka dikeluarkan deklarasi bersama dalam program-program anti pembajakan di lautan. Selain membangun kerangka kerja sama keamanan yang lebih luas, ASEAN juga melakukan kerja sama lintas kawasan dengan Uni

Eropa dengan memasukan isu terorisme ke dalam agenda pembahasan ARF. Kerjasama dititik beratkan pada penegakan hukum, pelatihan agen-agen intelijen, menekan sumber-sumber keuangan teroris, memperkuat keamanan di perbatasan termasuk perpindahan penduduk, barang dan dokumen (Sudirman, 2017).

Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis tantangan keamanan ASEAN dalam menangani terorisme di Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Hal ini dianggap penting karena menyangkut keamanan di Asia Tenggara khususnya antara Indonesia dan Filipina. Karena melihat perkembangan saat ini terjadi banyak kasus-kasus di wilayah perairan ini seperti pembajakan laut, pengeboman, penyelundupan senjata, narkoba dan pencurian ikan yang merugikan secara ekonomi dan politik bagi kedua negara. Melihat berbagai permasalahan di atas, menarik untuk diteliti tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi ASEAN dalam menjaga keamanan regional Asia Tenggara.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peminat studi keamanan internasional non-tradisional, juga bagi masyarakat Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini bisa menyumbangkan atau memberikan rekomendasi bagi pegiat hubungan internasional yang berkonsentrasi pada studi ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tantangan keamanan yang dihadapi ASEAN dalam menangani ancaman terorisme di Laut Sulu dan Laut Sulawesi ?
2. Bagaimana ASEAN mengatasi tantangan keamanan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Tantangan ASEAN dalam Menangani ancaman terorisme di Laut Sulawesi dan Laut sulu.
2. Menjelaskan cara-cara ASEAN mengatasi tantangan keamanan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai rekomendasi bagi para pemerhati keamanan Internasional, khususnya keamanan laut dan keamanan non-tradisional
2. Sebagai bahan diskusi dan referensi mengenai kebangkitan Terorisme di kawasan Asia Tenggara.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.

Data diperoleh melalui sumber data sekunder. Data-data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, yakni melalui majalah, surat kabar, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data sekunder kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana perkembangan keamanan asean

dalam menangani terorisme di laut Sulawesi dan laut Sulu. Teknik Analisa Data dilakukan melalui interpretasi dari dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif - kualitatif. Dengan mengadakan survei terhadap literatur yang telah ada peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Untuk mengetahui validitas data informasi yang diperoleh diadakan *Cross cheking* data tersebut menunjukkan adanya *reliable* data yang akan di analisa.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi secara menyeluruh dan mendapatkan gambaran terperinci, maka peneliti telah membagi berdasarkan sistematika penelitian ke dalam dua bab. Pembagian bab-bab tersebut antara lain, sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada Bab Pertama peneliti akan memaparkan mengenai latar belakang yang memuat alasan pemilihan judul "Tantangan Keamanan ASEAN Dalam Menangani Ancaman Terorisme di Laut Sulawesi dan Laut Sulu". Disusul dengan rumusan masalah tentang permasalahan yang diangkat. Kemudian dijelaskan tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Diharapkan bab ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Kedua akan menjelaskan landasan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan *Teori Security Complex* dan Konsep

Terorisme. Kerangka pemikiran dan hipotesis mengenai penelitian yang dilakukan juga dijabarkan dalam bab ini.

BAB 3: PEMBAHASAN

Pada Bab ketiga akan menjelaskan bagian inti dalam penelitian, yang memaparkan penelitian yang dilakukan, argumen serta data-data yang digunakan untuk menjelaskan studi kasus dalam penelitian yang dikaitkan dengan landasan teori atau konsep yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

BAB 4: PENUTUP

Pada bagian bab terakhir, yaitu bagian penutup. Peneliti memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Apakah hasil penelitian mendukung hipotesis peneliti yang sudah peneliti buat sebelumnya.